

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, Sleman.
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Arnold Ferdinand Bura, M.A.P., dkk., 2023, *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Armasito, S.H., 2021, *Hukum Disabilitas Di Indonesia*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Alfi Fahmi adicahya, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Implementasi dan Teori, Sumber Ilmu Utama, Bandung.
- Endang Sri Wahyuni, S.St., MPH, 2021, *Akseibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik*, Penerbit NEM.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Fauzi Iswahyudi, 2019, *Peran Perancang Peraturan Perundang – Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*, CV Enam Media, Medan.
- Fitria Mutia, 2023, *Akses, Informasi, & Disabilitas*, Penerbit Airlangga University Press.
- H.D Stout dalam Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ishak Salim, M. Joni Yulianto, 2021, *Memantau Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas*, Penerbit Perpustakaan Nasional RI.
- Ledia Hanifa Amaliah, 2016, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Penerbit Beebooks Publishing.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah

Mada University Pers, Cetakan ke-10

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suhardjono, 2020, *Kebijakan dan Regulasi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman.

#### **B. Jurnal :**

Ade Risna Sari dan Putri Catur Sembadani, The Role of the Black Lives Matter Movement in Responding to the Issue of Racism Against Blacks in the United States, *Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH)* Vol. 1, No.3 Tahun 2022

Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020

Dudung Abdullah, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum Positum*, Vol 1 No. 2 Tahun 2018

Diasa Inas Wishesa, 'Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit', *Jurist – Diction*, Vol 3 No. 5 Tahun 2020

Endah Rantau Itasari, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat, *Journal Integralistik*, volume 32, Nomor 2, 2020

Ebenhaezer Alsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022

Firda Silvia dan Hadiyanto Abdul. Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4 No.2 Tahun 2021

Heny Kristiana, Optimalisasi Bimbingan Karir Dalam Proses Pengembangan Diri Penyandang Disabilitas Di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus, Konseling Edukasi *Journal of Guidance and Counseling*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022

Jane Kartika Propiona, Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan): 1-18*

Purnomo, Budi. "Kendala Implementasi Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 1, 2019

R. Agus Abikusna, 'Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah COVID – 19', *Jurnal Sosfilkom*, Vol 14 No. 2 Tahun 2020

Zaini Ali, 'Peranan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Jurnal Wedana : Kajian Pemerintah, Politik, dan Birokrasi*, Vol 3 No. 2 Tahun 2018

### **C. Peraturan Perundang - Undangan:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak – Hak Penyandang Disabilitas.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.

### **D. Website**

Kominfo, Kota Ramah Disabilitas, Fasilitas Apa Saja Yang Mesti Tersedia. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13685/kota-ramah-disabilitas-fasilitas-apa-saja-yang-mesti-tersedia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13685/kota-ramah-disabilitas-fasilitas-apa-saja-yang-mesti-tersedia/0/sorotan_media) Diakses pada tanggal 3 Januari 2024

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, <https://satudata.banyuwangikab.go.id/dataset/detail/80a8155eb153025ea1d513d0b2c4b675> diakses pada tanggal 3 januari tahun 2024